

# Pengaruh Kemiskinan terhadap Praktik Dinasti Politik di Indonesia dan Filipina Tahun 2017-2021

Hikam Putra Pradikta<sup>1</sup>  
Universitas Brawijaya<sup>1</sup>

## ABSTRACT

This article aims to determine the influence between poverty and the expansion of political dynasties in the Philippines and Indonesia in 2017-2021. To provide comprehensive empirical, testing is carried out using multiple linear regression tests. The author uses multiple linear regression tests. The author uses three independent variables representing wealth through the variable Gross Domestic Product (GDP) Per Capita, welfare through the Human Development Index (HDI), and inequality through the Gini Ratio. As a result, the author finds empirical findings about the influence of poverty on political dynasties in both countries. In the Philippines, only wealth and prosperity can affect political dynasties. While in Indonesia, only wealth and prosperity can affect political dynasties. In general, poverty in both countries contributes to the expansion of political dynasties.

Keywords: poverty, political dynasty, multiple linear regression

## A. PENDAHULUAN

Secara luas sistem demokrasi disebut-sebut mampu memfasilitasi dan menopang pembangunan ekonomi dan manusia secara inklusif bagi negara-negara dunia. Demokrasi banyak diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih dapat diprediksi, meningkatkan stabilitas makroekonomi, dan mampu mengatasi krisis ekonomi dan politik. Secara teori, demokrasi menjamin suara yang sama dalam pengambilan keputusan pemerintah melalui mekanisme seperti *one-person-one-vote*, kesetaraan partisipasi politik, dan kebebasan berbicara. Namun, institusi demokrasi yang kurang berkembang seperti partisipasi politik yang lemah dapat menghasilkan dinasti politik.

Dinasti politik adalah bentuk khusus dari elite politik dalam upaya mempertahankan kekuasaan melalui satu atau beberapa kelompok keluarga yang memonopoli kekuasaan politik. Fenomena dinasti politik biasanya dianggap sebagai fenomena yang tidak demokratis. Namun, terdapat banyak contoh fenomena tersebut tumbuh di negara demokrasi. Perkembangan demokrasi perwakilan mengakibatkan pergantian kekuasaan secara turun-temurun melalui pemilihan umum sebagai mekanisme kunci pemilihan politik.

Meski begitu, penggunaan kekerabatan seringkali tetap berperan sebagai penentu kelas penguasa di demokrasi. Contohnya adalah George W. Bush dan Hillary Clinton di Amerika Serikat, Perdana Menteri Justin Trudeau di Kanada, Presiden Korea Selatan Park Geun Hye, Perdana Menteri Abe Shinzo di Jepang, dan Sonia dan Rahul Gandhi di India. Contoh di Eropa yang menarik adalah mantan Perdana Menteri Belgia dan Presiden pertama European Council

---

[\*corresponding author: hikamputra01@gmail.com<sup>1</sup>]

Herman Van Rompuy yang istri, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan dua putranya pernah atau masih aktif secara politik.

Secara lebih umum, kumpulan data komparatif yang dikumpulkan oleh Fiva dan Smith menyoroti bahwa dinasti politik tetap menjadi fenomena umum di banyak negara demokrasi modern dan berfungsi dengan baik, meskipun prevalensinya berbeda secara signifikan di seluruh negara. Di tingkatan yang lebih tinggi ada negara-negara berkembang seperti Filipina dengan lebih dari 40% dinasti di tingkat nasional dan negara-negara demokrasi kecil seperti Islandia dengan lebih dari 30%. Di negara demokrasi maju seperti Jerman dan Kanada juga masih terdapat fenomena tersebut walau jumlahnya kecil kurang dari 5%.

Di Indonesia dialektika demokrasi dimulai semenjak runtuhnya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto setelah 32 tahun menjabat (1966-1998). Runtuhnya rezim Suharto mengantarkan Indonesia kepada era baru yang populer dikenal sebagai era reformasi. Tuntunan dasar gerakan reformasi dalam berbagai manifestasinya adalah demokratisasi struktur politik. Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam seruan demokratisasi ini adalah penataan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Para pemimpin daerah menyuarkan keluhan yang telah lama ditahan terhadap aturan sentralisasi dan menuntut kontrol daerah atas urusan politik dan ekonomi. Tuntutan ini khususnya keras digaungkan di daerah yang kaya akan sumber daya seperti Aceh, Riau, Kalimantan, dan Papua.

Pada Juni 1999 di bawah pemerintahan Habibie, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama setelah 44 tahun. Pemilihan umum yang relatif bebas dan adil ini rakyat memilih perwakilan untuk tingkat nasional/Dewan Perwakilan Rakyat, provinsi/DPRD Provinsi, dan daerah/DPRD Daerah. Selanjutnya UU Desentralisasi Indonesia disahkan parlemen nasional pada Mei 1999 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2001. Dengan berlakunya UU tersebut berbagai macam kekuasaan dilimpahkan ke tingkat kedua yaitu kabupaten/kota, bukan ke tingkat provinsi dan pusat. Maka dalam waktu sekitar dua tahun Indonesia akan memperlihatkan pelimpahan kewenangan yang signifikan dari satu rezim yang sangat tersentralisasi di Jakarta ke lebih dari 360 pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Demokratisasi yang dilakukan Indonesia dari tahun 1998 hingga saat ini mengalami berbagai dinamika perubahan dari tahun ke tahun. Salah satu dinamika demokrasi di Indonesia adalah dengan munculnya fenomena dinasti politik di Indonesia. Dinasti politik ini muncul akibat arus desentralisasi yang mulai dilaksanakan di era reformasi dengan memanfaatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama demokrasi.

Sejak dilaksanakannya pilkada pertama pada tahun 2005, dinasti politik di Indonesia semakin marak terjadi. Menurut Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada tahun 2013 dinasti politik naik 11 persen dari sebelumnya hanya 3 persen atau 58 orang dari 524 kepala daerah di Indonesia. Penelitian juga dilakukan oleh Nagara Institute yang mengukur presentasi dinasti politik di Indonesia berdasarkan pemilihan kepala daerah pada periode 2015 sampai 2017 yang digelar dalam 541 wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Hasilnya ditemukan bahwa Provinsi Banten menempati peringkat tertinggi dengan 55,56 persentase, keseluruhan persentase dari tahun 2013 juga ditemukan naik dengan jumlah persentase 14,78 persen.

--	--	--

Dinasti politik ini muncul di banyak wilayah misalnya di Dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, Dinasti Narang di Kalimantan Tengah, Dinasti Sjahroeddin di Lampung, Dinasti Fuad di Bangkalan (Madura) dan Dinasti Chasan Sochib (Kelompok Rau) di Banten yang terkenal masif di Indonesia. Dalam satu periode kerajaan ini dapat menempati 9 posisi dari tingkat Gubernur di Provinsi hingga DPRD di tingkat kabupaten/kota.

Pilkada di tahun 2020 menunjukkan jumlah angka dinasti politik yang sangat tinggi, sebanyak 158 calon mempunyai kekerabatan dengan elite politik Indonesia dan 67 di antaranya berhasil menang. Paling banyak menjadi perhatian adalah majunya putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota Solo dan iparnya, Bobby Nasution, maju sebagai calon walikota Medan. Tidak ketinggalan, puteri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga maju dalam pemilihan walikota Tangerang Selatan, Banten bertarung melawan keponakan Menteri Pertahanan dan Keamanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Selain itu, Pilar Saga Ichsan sebagai bakal calon wakil walikota Tangsel yang merupakan putra Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan keponakan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Fenomena dinasti politik tidak hanya marak terjadi di Indonesia. Negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara yang juga terkenal dengan dinasti politiknya adalah Filipina. Selama hampir 400 tahun masa kolonial Spanyol, kekuasaan ekonomi dan politik Filipina dibatasi untuk elit politik tertentu yang dikenal sebagai *principalia*. Pada tahun 1899 Amerika Serikat datang di Filipina dan memperkenalkan pemilihan lokal pertama pada tahun 1901, pemilihan legislatif distrik di 1907, dan pemilihan Senator pada tahun 1916. Pengenalan desentralisasi kekuasaan pada tingkat lokal memberikan keluarga *principalia* kekuasaan ekonomi dan politik yang substansial. Pelaksanaan pemilihan umum meningkatkan lingkup pengaruh politik dari keluarga-keluarga ini.

Baik Indonesia dan Filipina merupakan negara yang demokratis. Praktik dinasti politik dapat dikatakan mengganggu kesehatan demokrasi suatu negara. Dinasti politik dapat melemahkan kontrol masyarakat terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya proses *check and balances*. Selain itu, praktik dinasti politik menandakan adanya kemerosotan kesetaraan politik dan memonopoli politik, kelompok yang berkuasa dapat menggunakan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadi tanpa rasa takut akan pergantian atau sanksi administratif. Dinasti politik juga dapat mengunggulkan calon keluarga dalam pemilihan politik, dengan demikian memungkinkan untuk calon yang terbaik dan tercerdas dapat terpilih.

Berdasarkan paparan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti keterkaitan faktor ekonomi terhadap pembentukan dinasti politik di suatu negara. Peneliti membandingkan dua negara yang serupa dan marak terjadi praktik dinasti politik. Melalui perbandingan, peneliti hendak melihat sejauh mana pengaruh faktor ekonomi dalam hal ini tingkat kemiskinan suatu wilayah terhadap pembentukan dinasti politik. Maka dari itu, judul dari penelitian ini adalah "Pengaruh Kemiskinan terhadap Dinasti Politik di Indonesia dan Filipina pada Tahun 2017-2021"

--	--	--

## B. KERANGKA ANALISIS & METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kemiskinan dengan dinasti politik. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian akan menggunakan metode kuantitatif. Secara mendasar, penelitian kuantitatif menggunakan analisis berbasis pada angka sehingga mempermudah dan mempercepat dalam proses pengambilan kesimpulan. Lebih lanjut, penuli akan menggunakan uji regresi untuk melihat korelasi antara kemiskinan dengan dinasti politik. Penggunaan regresi linear berganda akan digunakan untuk mendapatkan jawaban seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah itu, peneliti akan menggunakan pendekatan eksplanatif untuk memberikan penjelasan terhadap hasil korelasi kedua variabel. Hasil dari uji regresi tentu akan berguna bagi pemberian penjelasan, justifikasi, atau penolakan terhadap hipotesis yang diuji.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan yang berdasarkan pada data sekunder melalui laporan data statistik pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik dari Indonesia dan National Statistics Coordination Board (NSCB) di Filipina. Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku pustaka, jurnal, laporan penelitian, e-book, dan sumber elektronik internet yang menunjang dan memberikan informasi mengenai dinasti politik di kedua negara. Adapun, indikator dari variabel independen dan dependen yang penulis teliti sebagai berikut.

Variabel Dependen: Dinasti Politik Herfindahl Hirschman Index (HHI) Indikator dinasti politik diukur dengan mengkodekan jumlah dinasti yang sebenarnya (dan bukan hanya perkiraan berdasarkan pendapat para ahli). Guna mendeteksi dinasti politik di Filipina, penulis menggunakan pendekatan identifikasi nama yang menghubungkan politisi lokal satu sama lain berdasarkan nama keluarga. Pendekatan ini diterapkan dengan tepat di negara Filipina karena tidak seperti di negara lain di mana nama belakang seseorang dapat diadopsi oleh orang lain yang tidak terikat darah kekeluargaan, pada masa kolonial Spanyol, semua orang Filipina diharuskan mengadopsi nama belakang berdasarkan pada sebuah buku yang menghasilkan ketetapan nama belakang di seluruh negeri.

Meminimalkan kemungkinan bahwa nama belakang yang sama dipilih oleh dua orang Filipina mana pun dari bagian negara yang berbeda. Selain itu, dinasti lokal tidak mungkin mentolerir kandidat yang tidak terkait yang mencoba memenangkan pemilihan hanya dengan kesamaan nama belakang mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mencocokkan nama keluarga pejabat yang terpilih dengan nama keluarga petahana, seperti di Filipina yang menyiratkan struktur keluarga nama laki-laki atau perempuan lajang yaitu:

*Nama depan\_nama tengah\_nama belakang*

Dimana nama tengah sesuai dengan nama keluarga ibu dan nama belakang sesuai dengan nama keluarga ayah. Dalam kasus wanita yang sudah menikah, struktur namanya mengambil bentuk berikut:

*Nama depan\_nama tengah\_nama belakang\_nama belakang suami*

--	--	--

Nama tengah sesuai dengan nama keluarga ibu, nama belakang sesuai dengan ayah dan tambahan dengan nama belakang suami. Dalam hal ini kerabat diidentifikasi dengan menemukan kecocokan nama tengah, nama belakang, atau nama belakang suami dalam wilayah yang sama.

Selanjutnya, penulis melakukan pengukuran konsentrasi dinasti politik di suatu wilayah dengan mengadopsi pengukuran Herfindahl-Hirschman Index (HHI) yang mengukur pangsa pasar dari berbagai perusahaan. Dalam hal ini, setiap posisi yang terpilih di suatu wilayah dianggap sebagai bagian dari keseluruhan pangsa pasar. Dengan menggunakan HHI, maka share (peran) keluarga dinasti diukur secara kuadratik sehingga semakin besar pangsa keluarga dinasti politik di suatu wilayah maka semakin besar nilai indeks HHI. Oleh karena itu dimungkinkan untuk mengukur pangsa pasar politik dinasti politik relatif terhadap jumlah total posisi di provinsi menggunakan rumus ini:

$$H = \sum_{i=1}^n s_i^2$$

Keterangan:

$s_i$  = pangsa pasar masing-masing keluarga  $i$  di suatu daerah

$n$  = Jumlah nama keluarga yang menjabat

$H$  = Herfindahl Hirschman Index yang dinyatakan oleh bilangan bulat

Indeks HHI hanya mampu mengukur konsentrasi satu dinasti politik (HHI mendekati 1) atau tidak terkonsentrasi/merata (HHI mendekati 0). Indeks ini hanya digunakan oleh negara Filipina karena negara Indonesia tidak bisa mengidentifikasi berdasarkan nama saja. Data yang digunakan adalah 17 wilayah di Filipina dan posisi yang terpilih adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, dan Wakil Walikota pada tahun 2017-2021.

#### Variabel Dependen 2: Material Power Indeks

Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz menjelaskan bahwa jenis oligarki yang ada di Indonesia sebagai politico-business families, yaitu keluarga-keluarga yang mengandung unsur-unsur bisnis dan politik. Keluarga-keluarga ini selain menguasai jabatan politik di suatu wilayah, mereka juga memiliki bisnis yang menguasai ekonomi wilayah tersebut. Namun, menurut Winters hal tersebut belum tentu masuk ke dalam kategori oligark jika tidak mencapai ketimpangan material yang ekstrem.

Ketimpangan kekuatan material atau stratifikasi material yang ekstrem di suatu wilayah menjadi prasyarat utama terbentuknya oligarki. Ketimpangan material tersebut terbentuk akibat terkonsentrasinya kekayaan dan hak milik pada orang atau kelompok

--	--	--

tertentu dalam hal ini keluarga dinasti politik yang selalu tumbuh menjadi golongan kecil dalam suatu masyarakat.

Dalam mengukur kekuatan oligark dalam bentuk ketimpangan material di masyarakat, Winters menunjukkan kekayaan ekstrem secara kuantitatif yang dimiliki oleh oligark melalui Material Power Index (Indeks Kekuasaan Material). Material Power Index dapat mengukur kadar oligarki seseorang yang dirumuskan melalui total kekayaan orang atau sekelompok orang yang menjadi basis sumber daya kekuasaan materialnya dibagi dengan pendapatan per kapita (income per capita). Namun, pada level regional seperti provinsi tidak ada perumusan pendapatan per kapita maka pendekatan yang terbaik adalah menjadi total kekayaan oligark dibagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indikator inilah yang digunakan penulis untuk mengukur tingkat oligarki dinasti politik di Indonesia. Penulis mengidentifikasi Material Power Index prjabat gubernur di 34 provinsi Indonesia selama 2017-2021. Peneliti melihat total kekayaan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan gubernur provinsi kepada KPK. Setelah itu, nilai totalnya dibagi dengan angka PDRB per kapita dengan tahun yang sama pada saat LHKPN tersebut diterbitkan. Hasil bagi tersebut menunjukkan kadar indeks oligarki mereka

Variabel Independen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (current price) maupun atas dasar harga konstan (fixed price). Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah provinsi, kabupaten atau kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam periode tertentu, berdasarkan harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pergerakan nilai PDRB dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan indikator tersebut, maka akan diperoleh gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, diperlukan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga seperti inflasi. Dalam hal ini penulis menggunakan PDRB atas harga konstan tahun 2010 dengan jenis skala nilai

--	--	--

### Variabel Independen 2: Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam mengukur kualitas hidupnya, yaitu :

- a. Indeks Harapan Hidup.
- b. Indeks Pendidikan.
- c. Indeks Standar Hidup Layak

Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut :

$$IPM = \frac{1}{4} + (X_1 + X_2 + X_3)$$

Keterangan :

- $X_1$  = Indeks Harapan Hidup.
- $X_2$  = Indeks Pendidikan.
- $X_3$  = Indeks Standar Hidup Layak

Selanjutnya dalam menghitung Pertumbuhan IPM digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu dengan rumus:

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{\{IPM_{(t)} - IPM_{(t-1)}\}}{IPM_{(t-1)}} \times 100$$

Keterangan

- $IPM_{(t)}$  : IPM suatu wilayah pada tahun t
- $IPM_{(t-1)}$  : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

### Variabel Independen 3: Rasio Gini

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Bila  $GR = 0$ , ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila  $GR = 1$  artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

--	--	--

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai landasan teoritis utama adalah teori politik dinasti untuk memahami bagaimana kekuasaan politik diwariskan dalam lingkup keluarga atau kelompok tertentu dan bagaimana ini dapat terkait dengan kondisi sosial-ekonomi, terutama kemiskinan. Menurut teori politik dinasti, kekuatan dinasti politik tumbuh karena beberapa faktor, seperti akses terhadap sumber daya, kontrol atas institusi politik, dan adanya struktur sosial-ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu. Dalam konteks kemiskinan, dinasti politik dianggap memperkuat ketidaksetaraan dan ketergantungan terhadap elit politik, terutama di daerah-daerah yang miskin. Dengan kata lain, kemiskinan sering kali memperkuat keberadaan dinasti politik karena orang-orang miskin lebih rentan terhadap manipulasi politik, patronase, dan bantuan sosial sebagai alat politik.

Kerangka analisis ini juga mengacu pada teori dependensi, yang menyatakan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap elit lokal (yang sering kali adalah bagian dari dinasti politik) bisa memperburuk kemiskinan di daerah tertentu. Hubungan antara kemiskinan dan dinasti politik dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan uji regresi untuk mengidentifikasi korelasi dan pengaruh antar variabel.

Berbagai literatur yang berkaitan dengan politik dinasti dan kemiskinan memberikan pandangan penting dalam memahami dinamika antara keduanya. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa dinasti politik seringkali memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi yang buruk untuk mempertahankan kekuasaannya. Di Filipina, penelitian oleh Mendoza et al. (2016) mengungkapkan bahwa dinasti politik lebih kuat di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Di Indonesia, literatur yang ada seperti penelitian Winters (2013) menunjukkan adanya hubungan antara elit politik lokal dan patronase, yang dapat menghambat pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah miskin.

Penelitian lain oleh Querubin (2016) menyebutkan bahwa dinasti politik cenderung lebih bertahan di daerah dengan sumber daya ekonomi terbatas karena keluarga politik memonopoli akses ke sumber daya tersebut. Hal ini konsisten dengan temuan di berbagai negara berkembang, di mana dinasti politik memanfaatkan sumber daya negara untuk memperkuat kekuasaan mereka. Dengan demikian, tinjauan literatur ini memperkuat asumsi bahwa kemiskinan dan dinasti politik memiliki hubungan yang kuat, yang akan diuji dalam konteks Indonesia dan Filipina.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kemiskinan dengan dinasti politik. Analisis kuantitatif digunakan untuk memproses data numerik terkait tingkat kemiskinan dan eksistensi dinasti politik di kedua negara. Uji regresi linear berganda diterapkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemiskinan sebagai variabel independen terhadap dinasti politik sebagai variabel dependen. Metode eksplanatif digunakan untuk menjelaskan hasil dari uji regresi tersebut, yang memungkinkan penulis untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan sebab-akibat yang mungkin terjadi antara kemiskinan dan dinasti politik.

Penelitian ini berfokus pada dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina, dengan tingkat analisis pada level subnasional (provinsi/wilayah). Di Indonesia, penelitian mencakup 34

--	--	--



provinsi, sementara di Filipina penelitian mencakup 17 region. Periode waktu yang digunakan adalah dari tahun 2017 hingga 2021, di mana data yang diambil akan mencerminkan perubahan ekonomi dan politik selama periode tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber data sekunder, yang mencakup laporan-laporan statistik resmi dari pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia dan National Statistics Coordination Board (NSCB) di Filipina. Selain itu, literatur seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian digunakan untuk mendukung analisis. Penulis juga menggunakan data dari e-book dan sumber elektronik lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data melibatkan penggunaan software statistik untuk melakukan uji regresi linear berganda, yang akan mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

## C. RESULT AND DISCUSSION

### a. Kemiskinan dan Dinasti Politik di Filipina

Struktur sosial masyarakat Filipina sejak dahulu telah mengenal pengelompokan kelas yang menciptakan budaya patron klien dalam praktik politik. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946, dinasti politik di Kongres Filipina telah ada di mana-mana. Perkembangan sejarah dinasti politik terutama semakin berkembang melalui pengalaman kolonial Filipina. Pada masa penjajahan Spanyol yang berlangsung selama 400 tahun, kekuatan ekonomi dan politik berada pada orang-orang yang memiliki darah Spanyol.

Menurut Querubin, hal ini sejalan dengan sistem Maharlika yaitu sistem budaya pada masa prakolonial di Filipina yang mengenalkan sistem pembagian hierarkis dalam masyarakat. Sistem ini mengedepankan gagasan bahwa keluarga istimewa yang memiliki darah campuran serta kekayaan material memungkinkan mereka untuk menjalankan kekuasaan politik terhadap keluarga yang kurang beruntung sehingga tidak memiliki kapasitas untuk memerintah. Jadi, yang menjadi legitimasi pada masa itu adalah budaya penghormatan dan kepatuhan terhadap keluarga yang berkuasa.

Setelah berakhirnya masa kolonial Spanyol, Amerika Serikat memulai periode demokratisasi di Filipina melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan kompetitif baik di tingkat regional maupun nasional. Namun, kenyataannya yang berhasil duduk di bangku legislatif nasional dari tahun 1907 hingga 1932 kebanyakan berasal dari keluarga yang tertentu yang memiliki sumber daya melimpah. Bahkan, pemerintah AS memberlakukan prasyarat bagi calon pemimpin jabatan publik seperti tes literasi dan kepemilikan properti. Persyaratan ini disukai oleh keluarga kaya tertentu karena mereka memiliki nenek moyang dari kelas *Principalia* yang mendominasi ekonomi dan politik sejak dahulu. Mereka yang berasal dari kelas *Principalia* memiliki modal dan memiliki akses pembelajaran yang cukup sehingga saat dewasa dapat dengan mudah menjadi pejabat publik.

--	--	--

Setelah Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina, kelas-kelas dari keluarga Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, dan Diosdado Macapagal banyak menempati posisi sebagai pemimpin karena dianggap keturunan bangsawan dan terpelajar. Lalu, pada tahun 1950, partai politik mulai bermunculan di Filipina salah satunya adalah Partai Nacionalista yang dibentuk oleh Magsaysay sekaligus mengantarkannya sebagai presiden. Setelah Magsaysay meninggal pada 1957, Wakil Presiden Garcia diangkat menjadi Presiden. Pada periode selanjutnya, Diosdado Macapagal terpilih sebagai Presiden dan pada kepemimpinannya ia berhasil membangun ekonomi Filipina menjadi lebih baik, sehingga citra keluarga Macapagal dianggap sangat bagus yang nantinya dimanfaatkan oleh penerus dinastinya.

Pada tahun 1965, Ferdinand Marcos menjadi presiden pertama yang terpilih kembali pada tahun 1969. Mendekati akhir masa jabatan kedua dan terakhirnya sebagai presiden, ia mengumumkan darurat militer pada tahun 1972 dan membentuk rezim otoriter personalis. Kepemimpinannya yang otoriter menyebabkan gejolak politik yang panas di Filipina.

Setelah Marcos turun, Presiden Corazon Aquino terpilih dan membentuk pemerintahan revolusioner dengan mengeluarkan konstitusi sementara. Konvensi konstitusional yang baru dibentuk menyusun undang-undang dasar baru yang diratifikasi melalui referendum pada Februari 1987. Pemilihan Kongres Filipina pada Mei dan Juli 1987 menyelesaikan transisi menuju demokrasi. Terlepas dari pemulihan institusi demokrasi, pemberlakuan kebebasan pers, dan penghapusan undang-undang yang represif, transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi juga membuka jalan bagi pemulihan demokrasi elit dan kebangkitan kembali dinasti politik yang mengakar. Misalnya, anggota DPR yang dipilih pada tahun 1987, lebih dari 83% adalah anggota keluarga dan dinasti politik yang sama telah mendominasi politik sejak periode Amerika dan era praperang.

Dari waktu ke waktu, keluarga menjadi unit dasar dari pemerintahan di Filipina. Keluarga yang secara strategis mampu membentuk aliansi, mengumpulkan kekayaan dalam jumlah tak terbatas, hingga mengendalikan sarana produksi negara adalah keluarga yang dapat mendominasi kekuasaan politik di tingkat regional hingga tingkat nasional. Dengan demikian, ketergantungan pada ikatan kekerabatan inilah yang mengakar dan melegitimasi sistem politik yang mendukung patron-klien negara Filipina sehingga banyaknya praktik dinasti politik.

Dinasti politik Filipina memusatkan struktur kekuatan ekonomi dan politik yang yang dijadikan sebagai fitur abadi dari struktur sosial dan sistem politik negara yang dampaknya melemahkan pembangunan negara dan menghambat demokratisasi. Tercekik oleh klan politik yang kuat “dengan kepentingan sempit dan eksklusif” pembentukan negara dan demokratisasi terhalang terutama dengan tidak adanya lembaga politik yang layak seperti partai politik nyata dan pemilihan yang menjamin persaingan yang adil dan hasil yang kredibel.

--	--	--

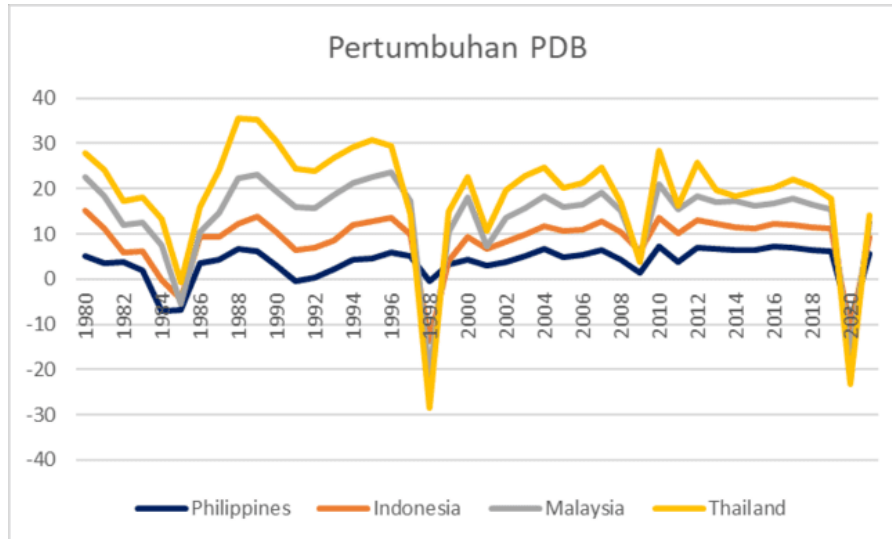
Dinasti politik terdiri dari elit politik kecil yang kekuasaannya dilegitimasi dengan menggunakan sistem pemilu yang sah, yang pada gilirannya memberi mereka kekuatan politik untuk mengontrol pemerintah dan mendapatkan akses ke sumber daya, lembaga, dan transaksinya yang meningkatkan dan melanggengkan kekuasaan mereka. Dibentuk oleh keluarga-keluarga terkaya, elit terkait dengan kelas sosial dalam masyarakat semi-feodal negara yang memberi mereka basis material kekuatan politik mereka, oleh karena itu, sebagai sarana dominasi kelas massa pemilih negara. Kelompok kecil dan terpilih dari orang-orang politik ini disebut juga sebagai oligarki birokrasi yang mengatur masyarakat melalui manipulasi ahli dari propaganda politik.

Ateneo School of Government Philippine menghimpun data tingkat dinasti politik pada Pemilihan Umum Tingkat Daerah di Filipina. Hasilnya, sejak Pilkada tahun 2007, Dinasti Politik di Filipina menunjukkan tren kenaikan. Dari tahun 2007 hingga tahun 2016 pemerintah tingkat lokal Filipina menjadi lebih dinasti dengan naik 4%.

a) Pengaruh PDB Perkapita terhadap Dinasti Politik

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Filipina secara umum mengalami pergerakan lamban selama 4 dekade terakhir dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand (Lihat Tabel). Pada tahun 1980, Filipina hanya mampu menyentuh angka pertumbuhan PDB sebesar 3,6% hampir setengah dari pertumbuhan PDB Malaysia dan Thailand pada saat itu.

Grafik 1. Pertumbuhan PDB Negara Asia Tenggara



Sumber: World Bank (n.d)

Pada tahun 1982, Filipina mengalami keruntuhan ekonomi karena kebijakan ekonomi Presiden Ferdinand Marcos yang gagal. Ketika perekonomian Filipina sedang terpuruk pada masa Marcos, monopolistik dinasti politik Filipina dimulai. Monopoli politik oleh beberapa keluarga bermunculan di provinsi-provinsi di Filipina dengan

--	--	--

memanfaatkan kesempatan pertumbuhan ekonomi yang sedang diusahakan oleh pemerintah pusat.

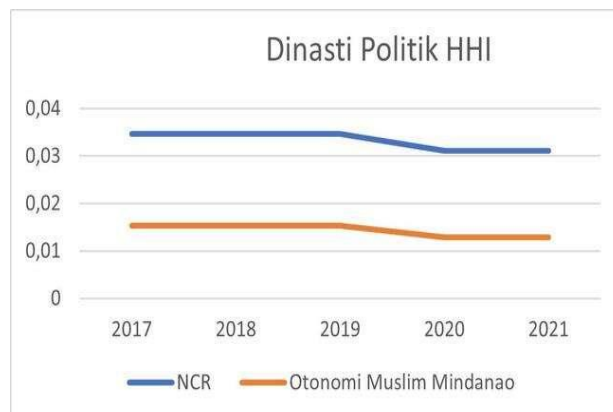
Hingga saat ini, Filipina berhasil meningkatkan pertumbuhan PDBnya tetapi, dinasti politik juga ikut meluas. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB Filipina berjalan selaras dengan meningkatnya konsentrasi dinasti politik di Filipina. PDB Perkapita pada tingkat wilayah menunjukkan korelasi yang positif terhadap tingkat konsentrasi dinasti politik di wilayah tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dari wilayah National Core Region (NCR) pada tahun 2017-2019. Selama 3 tahun tersebut, NCR mengalami pertumbuhan PDB yang cukup baik, bahkan pada tahun 2019 NCR mencatat nilai PDB terbesar dari seluruh wilayah di Filipina selama 5 tahun terakhir. Angka PDB yang tinggi tersebut diiringi dengan nilai konsentrasi dinasti politik yang digambarkan melalui Herfindahl Hirschman Index (HHI).

**Grafik 2.** Perbandingan PDB Perkapita



**Grafik 3.** Dinasti Politik HHI Muslim Mindanao dan NCR



--	--	--

Namun, di wilayah yang mempunyai PDB Perkapita rendah juga merupakan tempat berkuasanya keluarga dinasti politik. Wilayah Otonomi Muslim Mindanao misalnya, selama 2017-2019 merupakan wilayah dengan nilai PDB Perkapita terendah, tetapi memiliki tren peningkatan yang baik. Tren peningkatan PDB Perkapitanya diikuti dengan meluasnya kuasa dinasti politik di wilayah tersebut.

Temuan hasil penelitian ini sebenarnya bertolak belakang dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai korelasi PDB Perkapita dengan dinasti politik di Filipina. Penelitian yang dilakukan Ronald Mendoza menghasilkan bahwa korelasi antara peningkatan kekayaan masyarakat berpengaruh negatif terhadap perluasan dinasti politik. Namun, Mendoza menambahkan bahwa besar koefisien dalam penelitiannya sangatlah kecil yang menggambarkan kecilnya signifikansi dari kekayaan masyarakat terhadap dinasti politik.

Hasil penelitian ini dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Ronald Mendoza. Pada penelitian ini korelasi antara PDB Perkapita sebagai representasi dari kekayaan masyarakat bernilai positif terhadap konsentrasi dinasti politik di wilayah Filipina. Nilai koefisien korelasi PDB Perkapita adalah  $7,251^{-8}$  dan nilai signifikansi sebesar 0. Artinya, PDB Perkapita dapat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap dinasti politik dan dapat meningkatkan  $7,251^{-8}$  nilai Dinasti Politik Herfindahl-Hirschman Index setiap peningkatan satu satuan PDB Perkapita di Filipina dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Nilai tersebut cukup kecil untuk dapat memengaruhi nilai konsentrasi dinasti politik. Selaras dengan Mendoza yang menyatakan bahwa perbaikan kondisi ekonomi di Filipina tidak serta merta menghasilkan pembubaran dinasti politik atau pencegahan munculnya dinasti politik baru. Namun, diperlukan intervensi ekonomi yang harus menghasilkan peningkatan pendapatan yang dramatis untuk mendapatkan penurunan yang berarti dalam pengaruh dinasti politik.

Hasil temuan menunjukkan bahwa peningkatan PDB Perkapita sebagai salah satu tolak ukur kekayaan di satu wilayah Filipina nyatanya tidak cukup untuk mencegah timbulnya dinasti politik. Peningkatan kekayaan masyarakat sebenarnya seperti pedang bermata dua bagi dinasti politik. Selain dapat meningkatkan kemakmuran, peningkatan kekayaan masyarakat berpotensi mengubah distribusi kekuasaan politik, menghasilkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi dinasti yang menguasai sistem.

Akan tetapi, pada penelitian ini dinasti politik malah tumbuh subur beriringan dengan peningkatan PDB Perkapita. Hal dapat terjadi karena dinasti politik yang berkuasa cukup berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan dianggap berhasil. Lalu, petahana akan memanfaatkan citra keberhasilannya untuk memperluas atau meneruskan jabatannya kepada keluarganya. Secara tidak langsung, hal ini masih menunjukkan bahwa masyarakat Filipina masih memilih berdasarkan citra nama keluarga pejabat.

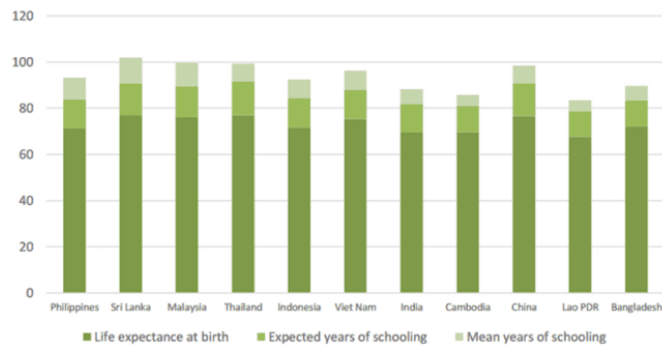
#### b) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Dinasti Politik

--	--	--

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang penting guna mengukur tingkat kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini secara umum dapat menjelaskan tiga pilar utama yaitu pendapatan perkapita (komponen pendapatan), rata-rata dan harapan tahun sekolah (komponen pendidikan), dan harapan hidup (komponen kesehatan).

Data UNDP dari 1990 hingga 2018, membandingkan nilai IPM Filipina dengan grup negara-negara di Asia (Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, and Vietnam). Data tersebut menggambarkan bahwa Filipina merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan IPM terendah dari negara-negara Asia lainnya.

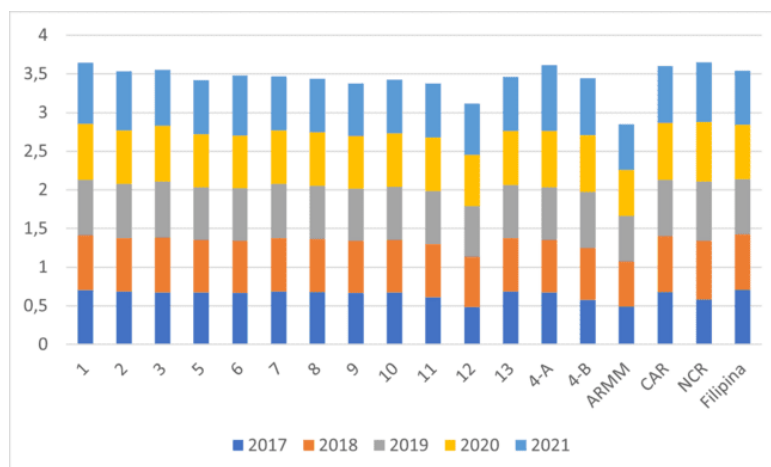
**Grafik 4.** Indeks Pembangunan Manusia Negara Asia



Rendahnya nilai IPM di Filipina terutama disebabkan oleh rendahnya angka harapan hidup masyarakat Filipina. Harapan hidup dipengaruhi tidak hanya oleh tingkat pendapatan, gizi, dan gaya hidup, tetapi juga oleh penentu kebijakan kesehatan seperti program dan kebijakan untuk perawatan kesehatan yang preventif dan kuratif, kualitas fasilitas dan institusi perawatan kesehatan dan ketersediaannya bagi masyarakat kelompok berpenghasilan rendah dan menengah

IPM dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah Filipina dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Indeks ini dapat menilai apakah kinerja suatu pemerintah telah baik atau masih buruk dalam upaya mensejahterakan rakyatnya. Guna meningkatkan nilai IPM diperlukan investasi pemerintah yang difokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Negara yang menerapkan sistem demokrasi perwakilan terdesentralisasi seperti Filipina, aktor pemerintah daerah berada di garis terdepan bagi inisiasi investasi tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

--	--	--

**Grafik 5.** Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Filipina 2017-2021

Otonomi Muslim Mindanao, Soccsksargen, dan Zamboangan Peninsula merupakan tiga wilayah di Filipina dengan nilai IPM terendah selama 2017-2021. Rendahnya nilai IPM di Filipina sebenarnya turut serta disebabkan oleh faktor bencana alam, namun bagi Mindanao hal ini diperparah oleh konflik sipil di wilayah tersebut sejak 1960. Wilayah Mindanao sangat rawan terjadi konflik sipil antara militer dengan kelompok bersenjata, bahkan hingga 2021 lebih dari 100.000 orang mengungsi di Mindanao karena konflik dan kekerasan.

Kecilnya angka IPM akan berpengaruh negatif terhadap dinasti politik di Filipina. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, Mindanao menjadi salah satu wilayah dengan dinasti politik yang luas berkuasa. Penelitian Ronald Mendoza menjelaskan bahwa masyarakat yang kurang sejahtera seperti dalam komponen pendidikan berkontribusi pada lingkungan di mana kekuasaan secara efektif dimonopoli oleh sekelompok kecil elit. Ketidakmampuan mayoritas untuk bersaing dengan elit menyiapkan panggung bagi munculnya banyak dinasti politik.

Hasil regresi penelitian ini menunjukkan bahwa nilai IPM di Filipina berpengaruh negatif terhadap Dinasti Politik Herfindahl Hirschman Index (HHI). Nilai koefisien signifikansi IPM adalah 0 yang berarti secara parsial IPM dapat berpengaruh signifikan terhadap HHI. Sementara, nilai koefisien regresinya sebesar -0,033 artinya setiap peningkatan satu satuan IPM akan menurunkan nilai HHI sebesar 0,033. Secara umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Filipina dapat melemahkan kuasa dinasti politik di wilayah.

Temuan tersebut tentu menegaskan pendapat Ronald Mendoza terkait pengaruh kesejahteraan terhadap meluasnya dinasti politik di Filipina. Maka dari itu, penting bagi pemerintah Filipina khususnya pemerintah lokal untuk meningkatkan investasi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Investasi ke dalam program ini dapat mengurangi kemiskinan dengan menawarkan jaring pengaman sosial kepada warga dan memberikan kesempatan politik yang lebih kompetitif.

--	--	--

c) Pengaruh Gini Rasio terhadap Dinasti Politik

Berbagai faktor berkontribusi terhadap munculnya dinasti politik, termasuk mahalnya biaya untuk mencalonkan diri atau membeli kursi jabatan. Akibatnya, selain politik menjadi berbiaya tinggi, proses pemilihan kepala daerah hanya akan bisa diakses oleh keluarga dinasti politik yang memiliki modal materi mumpuni.

Berdasarkan uji regresi penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi variabel Gini Rasio ( $\beta_3$ ) bernilai positif 0,009 artinya setiap peningkatan satu satuan Gini Rasio, akan menaikkan nilai Dinasti Politik Herfindahl-Hirschman Index di Filipina sebesar 0,009 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Namun, signifikansi variabel Gini Rasio di Filipina 0.508 yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial yang signifikan dari Gini Rasio terhadap HHI.

Temuan tersebut menjelaskan tidak ada pengaruh antara ketimpangan terhadap dinasti politik di Filipina. Memang, literatur empiris lebih banyak menunjukkan bahwa ada pengaruh sebaliknya yaitu wilayah yang memiliki tingkat dinasti politik yang tinggi akan menciptakan ketimpangan yang tinggi karena dinasti politik cenderung akan memperkaya diri.

Dinasti politik bukan hanya menguasai jabatan politik tetapi juga menguasai sumber daya ekonomi wilayah. Pada gilirannya sektor swasta yang seharusnya memberikan tekanan pada angka dinasti politik malah bekerja sama sehingga menyebarkan ketidaksetaraan politik dan ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di Filipina tidak didistribusikan dengan tepat khususnya kepada orang miskin oleh dinasti politik.

b. Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia

Sejak merdeka dari Belanda pada tahun 1945, berbagai fenomena politik menghiasi dinamika politik di Indonesia hingga kepada transisi demokrasi. Banyak ahli memandang bahwa negara yang menganut demokrasi setelah sebelumnya dijajah akan merasakan efek masih “terpenjara” dalam nalar praktik kolonialisme (Jati, 2013) Fenomena tersebut ditunjukkan di Indonesia dengan munculnya elite politik lokal ditandai dengan praktik dinasti politik, politik berdasar klan, politik klan, dan bos-bos politik lokal.

Secara umum elite politik lokal di Indonesia berarti orang-orang yang memiliki akses berlebih dari masyarakat lainnya untuk kekuatan sosial dan politik atau ekonomi di suatu wilayah. Setelah Indonesia merdeka, khususnya pada masa orde baru elite politik merujuk pada kelompok orang yang memiliki kekuatan politik yang didominasi oleh kalangan militer, aktivis mahasiswa, dan partai politik. Elite politik di masa itu, nyaris hanya dikuasai oleh orang-orang yang dekat dengan Presiden Soeharto dan berniat menjadi klien Soeharto, seperti ABRI.

--	--	--



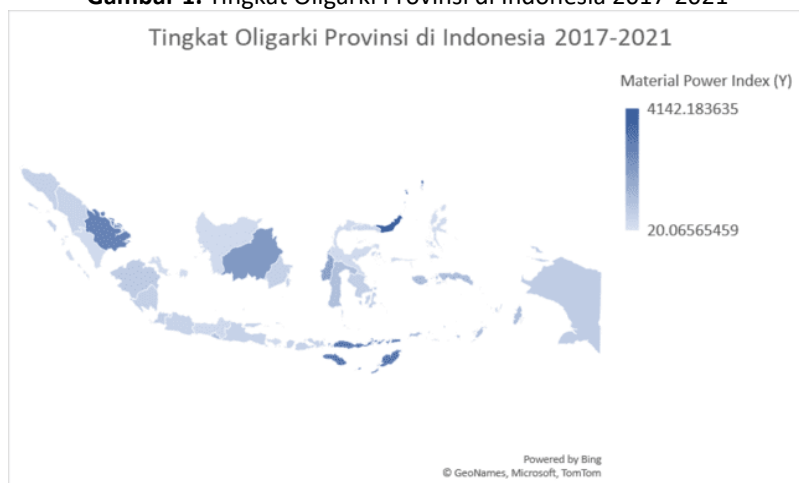
Menurut Agustino dan Muhammad Agus, orang kuat lokal di Indonesia lahir dari praktik patron-klien yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Di bawah rezim Soeharto bersama keluarga Cendana dan kroninya berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan mengeruk kekayaan di beberapa daerah Indonesia sambil membangun dan memelihara orang kuat lokal (Yusoff, 2010).

Terdapat 3 cara bagi orang kuat lokal untuk melakukan kontrol sosial di masyarakat. Pertama, mereka tumbuh subur dalam masyarakat ibarat sebuah jaringan yang nyaris mandiri. Kedua, mereka berhasil bukan hanya memiliki legitimasi dan dukungan tetapi menciptakan ketergantungan bagi masyarakat karena orang kuat lokal mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ketiga, orang kuat lokal berhasil menguasai (Sidel, 2004) lembaga-lembaga dan sumber daya negara sehingga sulit menciptakan perubahan kebijakan

Pada masa Orde Baru, orang kuat lokal cenderung berperan sebagai perpanjangan tangan dan bergantung kepada pemerintah pusat karena kuatnya rezim otokratis Orde Baru. Seiring dengan tumbanganya Orde Baru, ruang dan peran orang kuat lokal semakin luas menjadikan orang kuat lokal berupaya mandiri untuk tetap bertahan dalam lanskap ekonomi dan politik di daerahnya masing-masing. Pada gilirannya, dengan adanya desentralisasi setelah Orde Baru orang kuat lokal semakin meluas dan mengakar untuk mempertahankan kekuasaan di daerahnya masing-masing.

Pilkada sebagai praktik prosedural dalam sistem demokrasi nyatanya hanya menjadi kendaraan bagi dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan kelompok keluarganya yang sebenarnya praktik dinasti politik tersebut membahayakan demokrasi di Indonesia. Demokratisasi di Indonesia sebagai wujud pembangunan malah memberikan celah bagi orang kuat lokal untuk bertransformasi menjadi keluarga kuat lokal atau dinasti politik.

**Gambar 1.** Tingkat Oligarki Provinsi di Indonesia 2017-2021

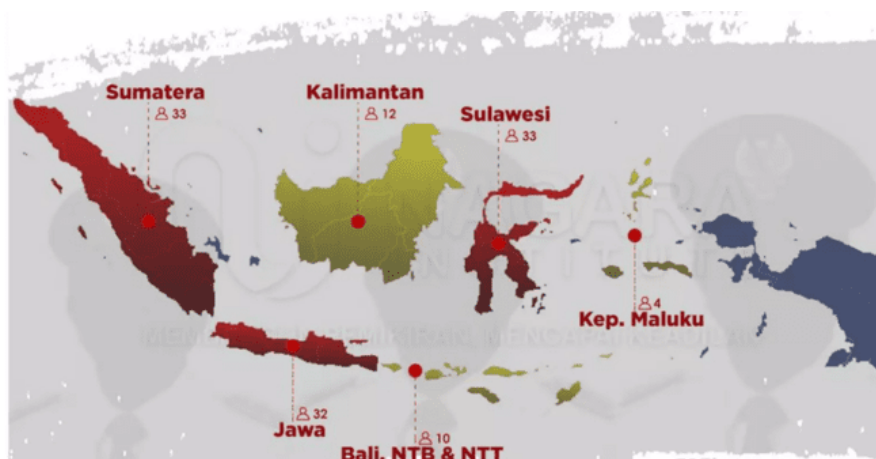


--	--	--

Gambar di atas menunjukkan tingkat oligarki pejabat daerah provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021. Tingkatan oligarki tersebut dihitung menggunakan nilai Matera Power Indeks dengan membagi kekayaan pejabat daerah dalam hal ini Gubernur dengan PDB Perkapita daerahnya. Hasilnya, Provinsi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan secara berurutan menempati 5 posisi tertinggi atau 5 provinsi dengan tingkat oligarki tertinggi selama 2017-2021.

Secara umum, daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara memiliki tingkat oligarki yang tinggi di Indonesia. Artinya di daerah-daerah ini masih ada ketimpangan yang luar biasa antara pejabat daerah dengan rakyatnya. Selain itu, besar kemungkinan bahwa ekonomi daerahnya hanya dimiliki oleh segelintir elit saja. Oligarki ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan modal yang kuat untuk membangun kekuasaan politik berdasarkan asas kekeluargaan atau dinasti politik.

Gambar 2. Sebaran Dinasti Politik pada Pilkada 2020 di Indonesia



Hasil riset Nagara Institute pada tahun 2020 menunjukkan sebaran dinasti politik di Indonesia pada Pilkada Tahun 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa Pulau Sulawesi memiliki sebaran dinasti politik tertinggi dengan jumlah 33 orang, diikuti Sumatera dengan jumlah yang sama, Pulau Jawa 32 orang, dan Bali & Nusa Tenggara sebanyak 32 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat oligarki dapat menguatkan dinasti politik di daerah.

Sebagai salah satu realita di Sulawesi adalah dinasti Yasin Limpo yang diprakarsai oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo Dinasti sejak H.M Yasin Limpo yang merupakan Jendral Besar di masa pemerintahan orde baru yang melahirkan anak-anak yang saat ini berada dalam garis dinasti Yasin Limpo yakni Syahrul Yasin Limpo, Tenri Olle Limpo, Ichsan Yasin Limpo, Haris Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo dan Dewi Yasin Limpo. Selain itu ada beberapa keluarga dinasti yang menguasai Sulawesi

--	--	--

Tenggara seperti Kerry Saiful Konggoasa, Surunuddin Dangga, Ridwan Bae dan Laode Arusani.

Semakin kokohnya dinasti politik di Indonesia ditopang oleh beberapa faktor pemimpin daerah yang semakin oligarkis. Beberapa faktor yang memperkuat dinasti politik di Indonesia adalah pertama, para petahana memiliki investasi politik masa lalu yang dimanifestasikan dalam bentuk kinerja pemerintahan yang baik selama berkuasa. Melalui kinerja pemerintahan yang baik, keluarga petahana bisa diterima oleh masyarakat pemilih. Inilah salah satu modal kekuatan dari keluarga petahana bila dibandingkan dengan pasangan calon yang baru pertama kali terlibat dalam pilkada langsung. Modal investasi politik dari suami atau ayah dijadikan senjata dalam pilkada. Karena itu, kita sering mendapatkan slogan dalam kampanye politik pilkada yang bertuliskan: pilih yang sudah terbukti atau lanjutkan program yang sudah berhasil. Realita ini bisa dilihat dari dinasti politik Banten selama lebih dari 20 tahun dikuasai oleh dinasti Tb. Chasan Sochib, namun saat anaknya Ratu Atut terjerat kasus korupsi perlahan dinasti politik mereka runtuh karena rakyat Banten sudah mulai melihat kinerja buruk dari keluarga tersebut.

Kedua, jaringan kekuasaan, baik formal maupun non-formal sudah dikuasai. Penguasaan jaringan formal seperti partai politik maupun birokrasi sangat diperlukan dalam usaha mensolidkan kekuatan di daerah. Sebagai ilustrasi adalah dinasti Yasin Limpo yang sudah menguasai partainya di Sulawesi Selatan hingga ke proses kaderisasi keluarganya sejak dini. Lalu, dinasti Tb. Chasan di Banten yang sudah menguasai partai Golkar di Banten bahkan terlibat dalam pembentukan provinsi Banten. Selain itu, dinasti politik ini juga sudah menguasai kekuasaan non-formal seperti di Banten yang dikenal sebagai "kelompok Rawu"-nya yang sebenarnya merupakan nama kawasan pasar di Kota Serang, Banten. Akan tetapi, Rawu dalam pemahaman publik Banten merupakan sebutan bagi kelompok bisnis atau dinasti keluarga Chasan Sochib yang menguasai pemerintahan Banten sehingga kelompok ini bersifat patron bagi dinasti mereka.

Ketiga, kekayaan sebagai kekuatan dalam usaha membeli partai politik maupun suara pemilih. Sudah menjadi rahasia umum ketika perolehan suara itu bisa efektif dengan uang, maka hanya orang kaya mempunyai peluang dan mendominasi politik lokal. Dalam pilkada langsung uang sangat diperlukan dalam membiayai proses politik. Mulai membayar uang mahar partai, membiayai kampanye, membiayai lembaga survei sekaligus konsultan politik, membiayai parak saksi di TPS hingga memberikan uang kepada pemilih (Haboddin, 2015) Pentingnya keterlibatan uang dalam kesuksesan pilkada menggambarkan bahwa hanya mereka yang memiliki modal yang dapat menjadi pejabat publik. Karena itu, dalam pilkada langsung keterlibatan para petahana yang kaya dan pengusaha selalu hadir dalam pentas politik lokal. Lebih parahnya, demokrasi elektoral justru memperkuat kehadiran politisi kaya dan hartawan dalam politik lokal (Dhakidae, 2014).

--	--	--

- Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Tabel 1. Hasil Uji t  
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.769	1.530		1.156	.249
x1	-8.213E-9	.000	-.379	-4.662	.000
x2	.023	.021	.088	1.074	.285
x3	7.820	1.874	.291	4.174	.000

Gambar di atas merupakan hasil uji hipotesis parsial (Uji t) menggunakan SPSS oleh peneliti.. Uji t pada dasarnya menunjukkan sejauh mana variabel independen mempengaruhi interpretasi variabel dependen. Tingkat signifikansi pengujian menggunakan *significance level* 0,05 (= 5%). Penentuan hipotesis di atas dapat diraih apabila nilai probabilitas t-hitung lebih kecil dari *significance level* 0,05 maka Ho ditolak, namun apabila nilai probabilitas t-hitung lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima.

- Hasil Hasil Uji F

Tabel x Hasil Pengujian Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.002	3	.001	58.069	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.001	81	.000		
	Total	.003	84			

a. Dependent Variable: Dinasti Politik HHI

b. Predictors: (Constant), Gini Rasio, IPM, PDB Perkapita

Uji Hipotesis berganda bertujuan untuk menguji apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel.

Apabila Fhitung lebih besar dibandingkan dengan Ftabel maka hipotesis alternatif diterima. Artinya, semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau dapat dilihat pada hasil output SPSS pada tabel ANOVA. Hasil uji F berpengaruh secara simultan antar variabel-variabel independen

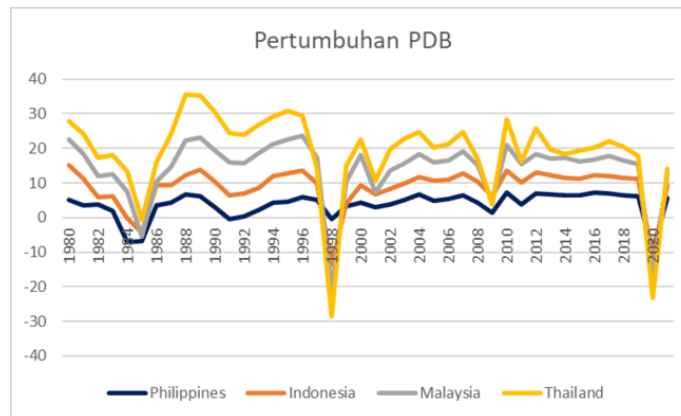
--	--	--

terhadap variabel dependen apabila nilai F (p value) lebih kecil dari 0,05. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $p \text{ value (sig)} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $p \text{ value (sig)} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

a) Pengaruh PDB Perkapita terhadap Dinasti Politik

**Grafik 6.** Pertumbuhan PDB Negara Asia Tenggara



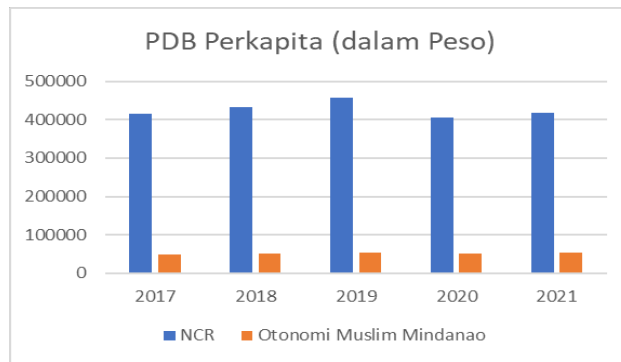
Sumber: World Bank

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Filipina dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pergerakan yang lebih lamban dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand (lihat grafik di atas). Pada tahun 1980, Filipina hanya mencapai tingkat pertumbuhan PDB sekitar 3,6%, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi. Ketika kebijakan ekonomi Presiden Ferdinand Marcos gagal pada tahun 1982, Filipina mengalami kejatuhan ekonomi yang cukup signifikan.

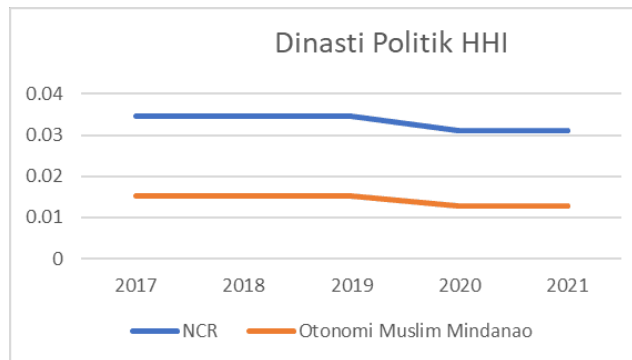
Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDB negara-negara tetangga terus berfluktuasi, dengan puncak pertumbuhan yang signifikan pada tahun 1990-an, sementara Filipina mengalami stagnasi selama periode yang sama. Kegagalan ekonomi ini beriringan dengan kemunculan dinasti-dinasti politik di Filipina, di mana keluarga-keluarga tertentu mulai menguasai provinsi-provinsi di tengah upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi.

--	--	--

**Grafik 7.** Perbandingan PDB Perkapita



**Grafik 8.** Dinasti Politik HHI dan NCR



Tabel diatas menunjukkan perbandingan PDB per kapita antara dua wilayah di Filipina, yaitu **National Capital Region (NCR)** dan **Otonomi Muslim Mindanao (OMM)**, dari tahun 2017 hingga 2021. Wilayah NCR, sebagai pusat ekonomi negara, memiliki PDB per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan OMM. Namun, meskipun OMM memiliki PDB per kapita yang rendah, wilayah tersebut tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini diiringi dengan semakin kuatnya pengaruh dinasti politik di kedua wilayah tersebut, sebagaimana terlihat dari **Herfindahl-Hirschman Index (HHI)** pada tabel ketiga.

NCR mencatat PDB tertinggi dari seluruh wilayah di Filipina pada periode 2017-2019, dan HHI menunjukkan konsentrasi dinasti politik yang signifikan di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan suatu wilayah, dinasti politik juga semakin berkembang. Sebaliknya, wilayah OMM yang memiliki PDB per kapita rendah juga tidak terbebas dari pengaruh dinasti politik. Meski PDB per kapita di OMM terus meningkat, indeks konsentrasi dinasti politik di wilayah tersebut juga bertambah.

Dalam hal ini ditemukan bahwa ada korelasi positif antara PDB per kapita dan dinasti politik, bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

--	--	--

Ronald Mendoza, yang menemukan korelasi negatif antara kekayaan masyarakat dan perluasan dinasti politik. Namun, penelitian ini memperkuat temuan Mendoza bahwa koefisien korelasinya kecil, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi pengaruh dinasti politik.

Secara keseluruhan, peningkatan PDB per kapita di Filipina tidak secara langsung mengurangi kekuasaan dinasti politik, melainkan memberikan ruang bagi dinasti yang berkuasa untuk terus berkembang melalui citra keberhasilan ekonomi yang mereka klaim. Meskipun ada peningkatan ekonomi, masyarakat Filipina cenderung tetap memilih berdasarkan nama keluarga yang sudah dikenal, menunjukkan bahwa dinasti politik di negara ini masih sangat kuat.

b) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Dinasti Politik

Hasil pengujian model regresi dengan menempatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel independen dari variabel dependen Material Power Index memperoleh hasil signifikansi 0,285. Nilai tersebut lebih besar dari syarat nilai alpha 0,05 sehingga Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh secara parsial terhadap Material Power Indeks.

Secara umum, memang IPM mempengaruhi dinasti politik seperti hasil penelitian Guritno yang berpendapat bahwa tingkat kemenangan dinasti politik dalam pilkada berkaitan dengan tingkatan pendidikan, ekonomi dan akses informasi di masyarakat. Dinasti politik cenderung mendapatkan suara yang lebih tinggi di wilayah yang kurang sejahtera (Gurtno dkk, 2019)

Namun, fakta data menunjukkan bahwa tingkat IPM provinsi yang ada di Indonesia selama 2017-2021 selalu berada di kriteria sedang hingga tinggi. Dapat dikatakan bahwa provinsi yang ada di Indonesia didominasi cukup sejahtera terlepas dari ada atau tidaknya monopoli dinasti politik.

c) Pengaruh Gini Rasio terhadap Dinasti Politik

Hasil pengujian model regresi dengan menempatkan Gini Rasio sebagai variabel independen dari variabel dependen Material Power Index memperoleh hasil signifikansi 0. Nilai tersebut lebih kecil dari syarat nilai alpha 0,05 sehingga Rasio Gini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Material Power Indeks.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa untuk terlibat dalam kontestasi politik diperlukan modal yang cukup besar. Material Power Indeks pada penelitian ini sebenarnya secara implisit menggambarkan ketimpangan karena menggambarkan rasio perbedaan kekayaan pemimpin daerah terhadap pendapatan perkapita rakyatnya.

Penemuan ini melihat bahwa ketimpangan suatu wilayah berpengaruh secara positif terhadap semakin kuatnya modal material pemimpin daerah. Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien positif 7,820 artinya setiap peningkatan satu satuan Gini Rasio, akan menaikkan nilai Material Power Indeks di Indonesia sebesar 7,820 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. Artinya semakin tinggi angka Gini Rasio yang berarti

--	--	--

semakin tidak meratanya ekonomi di suatu wilayah akan mengakibatkan semakin tingginya perbedaan pendapatan antara rakyat dengan pemimpinnya.

Jika, merujuk pada data jumlah pasangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Hampir semua provinsi di Indonesia memiliki pemimpin yang terkait dengan dinasti politik. Hal ini tentunya akan memperluas kekuasaannya tidak hanya dari kekuasaan material tetapi juga politik. Keadaan tersebut seolah menutup kesempatan bagi masyarakat karena mahalannya harga kursi politik dan sulitnya menembus monopoli dari dinasti.

Balisacan dan Fuwa juga menemukan bahwa ketimpangan adalah tahap awal dari meluasnya dinasti politik (Arsenio dkk, n.d.) Literatur Filipina banyak menjelaskan bahwa dinasti politik lahir dari elite feodal yang memiliki modal berlebih. Hal ini mencerminkan cara distribusi faktor produksi mempengaruhi distribusi sumber daya politik. Ketimpangan ekonomi pada gilirannya berhubungan dengan ketimpangan politik dengan cara elit ekonomi memonopoli kontrol atas institusi politik untuk memperkuat posisi mereka dalam masyarakat. Pada akhirnya, sistem politik tidak kompetitif dan hanya dapat diakses oleh segelintir kelompok.

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh kemiskinan terhadap peningkatan dinasti politik di Filipina dan Indonesia. Dalam upaya tersebut, peneliti menggunakan model regresi linear berganda dengan variabel independen Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Rasio. Sementara itu, guna menggambarkan dinasti politik digunakan variabel independen Herfindahl-Hirschman Index (HHI) untuk negara Filipina dan Material Power Index untuk negara Indonesia. Setelah melalui proses analisis deskriptif dan uji asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa data yang digunakan lolos uji asumsi klasik sehingga dapat diuji regresi.

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh hasil kesimpulan bagi negara Filipina bahwa PDB Perkapita dan IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap HHI. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kekayaan dan kesejahteraan masyarakat Filipina berpengaruh bagi menguatnya dinasti politik di Filipina. Namun, Gini Rasio sebagai representasi ketimpangan tidak memiliki pengaruh secara parsial.

Bagi Indonesia, PDB Perkapita dan Gini Rasio berpengaruh terhadap MPI. Namun, IPM tidak memiliki pengaruh. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kekayaan dan ketimpangan di Indonesia mempengaruhi menguatnya dinasti politik di Indonesia. Namun, IPM sebagai gambaran kesejahteraan masyarakat tidak memiliki pengaruh secara parsial.

Hasil regresi juga menghasilkan bahwa kedua negara memiliki pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan atau bersama-sama. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan kedua negara berpengaruh terhadap meluasnya dinasti politik. Guna melihat seberapa besar pengaruhnya dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi. Bagi Filipina, variabel dependen dinasti politik dapat dijelaskan oleh ketiga

--	--	--



variabel independennya sebesar 67,1%. Sementara itu, bagi Indonesia variabel dependen dinasti politik dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independennya sebesar 18,7%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan jauh lebih berpengaruh terhadap meluasnya dinasti politik di Filipina dibandingkan Indonesia.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, diperoleh hasil dimana kemiskinan jauh lebih berpengaruh terhadap meluasnya dinasti politik di Filipina daripada Indonesia. Hal tersebut tidak serta merta mengabaikan pengaruh kemiskinan di Indonesia. Tentunya, penekanan angka kemiskinan harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar tidak jatuh terlalu jauh seperti yang terjadi di Filipina.

Pemilu serentak pada tahun 2024, akan menguji seberapa kapabel iklim politik Indonesia dalam melahirkan kompetisi kandidat yang bermutu. Tentu, kita tidak mau kontes pemilu hanya dipenuhi oleh lingkaran keluarga dinasti politik yang pernah atau sedang berkuasa. Jangan sampai ruang kompetisi politik di Indonesia menjadi pengap sehingga hal ini harus diantisipasi.

## REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- ASEAN. (2020). *ASEAN Key Figures 2020*. ASEAN Statistics. Diakses September 14, 2022, dari [https://www.aseanstats.org/wpcontent/uploads/2020/11/ASEAN\\_Key\\_Figures\\_2020.pdf](https://www.aseanstats.org/wpcontent/uploads/2020/11/ASEAN_Key_Figures_2020.pdf).
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Balisacan, A. M., & Fuwa, N. (2004). Going beyond cross-country averages: Growth, inequality and poverty reduction in the Philippines. *World Development*.
- Constitutional Commission of 1986. (1986). *1987 Constitution of the Republic of the Philippines*. Official Gazette.
- Cruz, C., Keefer, P., & Labonne, J. (2015). Incumbent advantage, voter information, and vote buying. *Inter-American Development Bank*.
- Cruz, J. F., Mendoza, R. U., & Alungal, U. (2015). Do socio-economic conditions influence dynastic politics? Initial evidence from the 16th Lok Sabha of India. *SSRN Electronic Journal*.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political dynasties. *Review of Economic Studies*.
- Lozada, D. (2016, April 14). #PHVote: The rise of 'fat dynasties'. *Rappler.com*. Diakses pada Maret 14, 2023, dari <https://www.rappler.com/moveph/129360-political-dynasties-economic-growth-bicol/>
- Feinstein, B. D. (2010). The dynasty advantage: Family ties in congressional elections. *Legislative Studies Quarterly*.
- Fiva, J. H., & Smith, D. M. (2018). Political dynasties and the incumbency advantage in party-centered environments. *American Political Science Review*.

--	--	--

- Geys, B., & Smith, D. M. (2017). Political dynasties in democracies: Causes, consequences and remaining puzzles. *Economic Journal*.
- Gottfried, S. (2019). *Contemporary Oligarchies in Developed Democracies*. Palgrave Macmillan.
- Guritno, D. C., Samudro, B. R., & Soesilo, A. M. (2019). The paradox of political dynasties of regeneration type and poverty in regional autonomy era. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya: Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa.
- Harris, E. E. (1957). Political power. *Ethics*.
- Robinson, J. A. (2001). When is a state predatory? Diakses pada Maret 15, 2023, dari [https://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/898\\_jr\\_predatory.pdf](https://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/898_jr_predatory.pdf)
- Lim, T. C. (2010). *Doing Comparative Politics: An Introduction to Approaches and Issues*. Intelligence.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2012). Inequality in democracy: Insights from an empirical analysis of political dynasties in the 15th Philippine Congress. *Philippine Political Science Journal*.
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2013). Political dynasties and poverty: Resolving the 'chicken or the egg' question. *SSRN Electronic Journal*.
- Mendoza, R. U., Lopez, A. O., & Banaag, M. (2019). Political dynasties, business, and poverty in the Philippines. *SSRN Electronic Journal*.
- Mietzner, M. (2009). Indonesia's 2009 elections: Populism, dynasties, and the consolidation of the party system. *Lowy Institute for International Policy*.
- Munjin, A. (2018). *Oligarki dan Demokrasi: Kajian Sumber Daya Kekuasaan Kiai dan Jawara di Banten*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- United Nations. (n.d.). About HDRO. *Human Development Reports*.
- Curato, N. (2012, Oktober 1). What is wrong with political dynasties? *GMA News Online*. Diakses pada September 12, 2022, dari <https://www.gmanetwork.com/news/opinion/content/276345/what-is-wrong-with-political-dynasties/story/>
- O'Neil, P. H. (2017). *Essentials of Comparative Politics* (6th ed.). W. W. Norton & Company.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Diakses pada Maret 1, 2021, dari [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_22.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf)
- Querubin, P. (2016). Family and politics: Dynastic persistence in the Philippines. *Quarterly Journal of Political Science*, 11(2), 151–181.
- Querubin, P. (2011). Political reform and elite persistence: Term limits and political dynasties in the Philippines. *Mimeo*.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2005). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.

--	--	--

- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What democracy is... and is not. *Journal of Democracy*.
- Scruton, R. (2007). *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought* (3rd ed.). The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought.
- Sharp, A. M., Register, C. A., & Grimes, P. W. (1996). *Economics of Social Issues*. Irwin.
- Sidel, J. T. (2004). Bossism and democracy in the Philippines, Thailand, and Indonesia. In *Politicising Democracy: The New Local Politics and Democratisation*.
- Sujarwoto, S. (2015). Desentralisasi, dinasti politik dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- Tanzeh, A., & Arikunto, S. (2020). *Metode Penelitian*.
- Worstell, T. (2014, Agustus 27). By global standards there are no American poor; All in the US are middle class or better. *Forbes*. Diakses pada September 21, 2022, dari <https://www.forbes.com/sites/timworstell/2014/08/27/by-global-standards-there-are-no-american-poor-all-in-the-us-are-middle-class-or-better/?sh=566b15af5cb5>
- Tusalem, R. F., & Pe-Aguirre, J. J. (2013). The effect of political dynasties on effective democratic governance: Evidence from the Philippines. *Asian Politics and Policy*.
- Junaidi, V. (2018, Juni 26). Pilkada serentak: Bagaimana dampak politik dinasti dan apa perlu dihambat? *BBC News Indonesia*. Diakses pada September 12, 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44597871>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. *Indonesia*.
- CNN Indonesia. (2020, Desember 16). Dinasti politik di Pilkada 2020 disebut meningkat, 67 menang. Diakses pada Maret 9, 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201216200833-32-583132/dinasti-politik-di-pilkada-2020-disebut-meningkat-67-menang>
- Kementrian Dalam Negeri. (2013, Oktober 22). Kemendagri: Dinasti politik semakin meluas. Diakses pada Maret 23, 2021, dari <https://kemendagri.go.id/berita/baca/11872/kemendagri-dinasti-politik-semakin-meluas>
- World Bank. (2022, September 14). Measuring poverty overview. Diakses pada September 20, 2022, dari <https://www.worldbank.org/en/topic/measuringpoverty>
- ACAPS. (2023). Philippines Mindanao conflict. Diakses pada Maret 15, 2023, dari <https://www.acaps.org>

--	--	--